

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan paham demokrasi sebagai suatu yang dianggap penting dalam kehidupan bernegara. Demokrasi adalah suatu yang diperlukan karena merupakan gagasan politik yang mengandung nilai-nilai yang diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain, demokrasi dipandang sangat penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama masyarakat atau pemerintah yang baik. Partisipasi politik adalah suatu aspek penting dalam negara demokrasi. Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan yang mengacu kepada keikutsertaan warga negara dalam proses politik. Partisipasi politik adalah salah satu ciri utama dalam modernisasi politik dikarenakan pada masyarakat tradisional sifat kepemimpinan politiknya masih didominasi oleh elit-elit penguasa, dan keterlibatan warga negara dalam konteks politik telah menunjukkan adanya modernisasi politik.

Di negara demokrasi, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi akan semakin dianggap baik, namun sebaliknya jika suatu masyarakat kurang berpartisipasi maka akan dianggap buruk. Dikarenakan masyarakat tersebut tidak peka terhadap masalah-masalah kenegaraan. Suatu negara yang proses modernisasi politiknya berjalan dengan baik biasanya tingkat partisipasi warga negaranya meningkat. Ini dikarenakan saluran saluran demokrasi telah dibuka secara penuh.

Berbeda dengan negara negara yang proses modernisasi politiknya terhambat cenderung akan menghambat proses partisipasi warga negaranya.¹

Keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari: (1) Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. (2) Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dalam perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll. (3) Motivasi personal, artinya motivasi yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motivasi ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.²

Sedangkan bentuk- bentuk dari sebuah partisipasi politik adalah (1) Pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik yang terbiasa, yang sering kali lebih luas dibandingkan dengan partisipasi politik lain. (2) Lobbying, kegiatan itu dilakukan baik secara individual maupun secara

¹Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan setiap warga negara ikut serta berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan. Jika dilihat dari sudut pandang bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, jika diadopsi ke bahasa Indonesia, demos memiliki arti “rakyat” dan kratos memiliki arti “berkuasa”. Demokrasi juga diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hasanuddin Ali dkk, 2017, “Millennial Nusantara”, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, hal. 122

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1988, hlm 12

kelompok, yang pada dasarnya kegiatan itu dimaksud untuk mengadakan pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah atau pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan. Aktivitas lobbying sering kali dilakukan dengan secara informal. (3) Menggabungkan diri dengan organisasi politik, yang oleh Almond dikatakan sebagai kegiatan membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan. (4) Mencari koneksi merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah. (5) Bentuk-bentuk partisipasi politik yang tergolong dalam partisipasi non konvensional meliputi pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, pemogokan dan serangkain tindakan kekerasan, seperti kekerasan politik terhadap benda-benda yang berupaya perusakan, pemboman dan pembakaran.

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.³ Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang “Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai

³Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 31

pemilihan Kepala Daerah diatur oleh Undang-Undang. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, yaitu:⁴

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis)
2. Kompetensi politik pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih besar preferensi kandidat-kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertiban yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.

Di Indonesia sendiri telah melaksanakan Pemilukada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pemilukada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi

⁴*Ibid*

demokrasi di tingkat lokal.⁵ Salah satu tujuan pembentukan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁶

Pengaruh Agama terhadap politik terletak pada sifat dasar agama itu sendiri, yakni sebagai “sebuah sistem simbol yang membentuk kegairahan (moods) dan motivasi kuat, besar dan berjangka panjang pada kehidupan manusia dengan merumuskan konsepsi konsepsi mengenai tatanan umum kehidupan dan dengan membungkus konsepsi konsepsi tersebut dengan sebuah aura faktualitas sedemikian rupa sehingga tampak bahwa kegairahan dan motivasi tersebut benar benar nyata”⁷. Agama diyakini memiliki kekuatan untuk membangun solidaritas sosial, menghasilkan rasa bermasyarakat (*sense of community*).Rasa bermasyarakat ini pada gilirannya berfungsi sebagai mediasi bagi tindakan kolektif yang sangat penting dalam demokrasi.⁸

⁵ Bakti Saputra, Kekalahan Tobroni Harun- Komarunizar dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2015, Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2016, hal 2

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books Inc. Hal 33

⁸ Omar Fathurrahman. *Tarekhat Syathariyah di Minangkabau*. Jakarta:Prenanda Media Group, 2008.

Agama merupakan landasan mental spiritual yang sangat kuat, bagi umatnya berguna untuk menilai mana yang baik dan tidak, mana pemimpin yang baik dan tidak, pemimpin merupakan panutan mereka, maka mereka akan memilih orang yang beragama sama⁹. Survei yang dilakukan oleh Sharma, et al (2010) yang difasilitasi *IFES (International Foundation for Electoral Systems)* mengenai pemilu terhadap masyarakat Indonesia tahun 2010 menghasilkan beberapa temuan penting. Terkait dengan pengaruh nilai-nilai dan norma terhadap demokrasi, 62% orang Indonesia mengatakan bahwa agama memiliki pengaruh penting terhadap politik, yang mempengaruhi keputusan sampai batas tertentu (44%) atau terhadap sebagian keputusan mereka (18%) dan sisanya 38% mengatakan agama tidak berpengaruh.¹⁰

Sebagian bagian dari perkembangan demokrasi pasca reformasi di Indonesia, pilkada merefleksikan perubahan paradigmatik dan kemajuan besar kepala daerah. Semenjak diselenggarakan pertama pada 2005, mulai 2015 pilkada dilakukan secara serentak di beberapa daerah.¹¹

Karakter religius masyarakat Indonesia memiliki konsekuensi penting secara politis. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, agama juga bagian dari sosialisasi dan mendorong partisipasi sosial politik. Kegiatan sosial di Indonesia sering bertepatan dengan kegiatan sosial keagamaan yang dimotivasi oleh keyakinan agama, Dalam interaksi kegiatan agama tersebut, masyarakat bukan saja mendengarkan nasihat keagamaan, tetapi juga belajar dan memperoleh informasi

⁹Analisa Journal of Social Science and Religion, Volume 22 No. 02 December 2015 hal 161-172

¹⁰Analisa Journal of Social Science and Religion, Volume 22 No. 02 December 2015 hal 161-172.

¹¹ Jurnal Penelitian Politik ,Volume 15 No. 2 Desember 2018.

tentang politik. Mereka juga terinspirasi dan termotivasi untuk memperoleh informasi tentang urusan-urusan publik, salah satunya pemilu.¹²

Isu agama menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Keterkaitan agama dan politik menjadi problematik manakala berkaitan dengan partikularitas politik lokal, misalnya munculnya isu identitas, seperti sentimen agama, etnisitas, putra daerah dan mayoritas-minoritas.¹³ Dalam tradisi komunitas agama dan kesukarelaan sipil tersebut, masyarakat juga tertarik mengikuti isu-isu politik, lebih banyak membahas politik, tertarik pada partai atau figur politik. Dalam konteks tersebut, warga akhirnya terdorong berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, termasuk pemilu dan partai politik. Lebih jauh, hal tersebut kemudian membentuk cara pandang, berpikir dan bertindak secara sosial dan politik, yang menjadikan agama sebagai salah satu cara menilai agama politik secara ideal. Proses internalisasi nilai-nilai tersebut juga mengarahkan pada keberpihakan politik.¹⁴

Hal tersebut dapat diamati pada keterlibatan masyarakat dalam organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Tarbiyah, Tarekat, dan sebagainya. Baik dalam komunitas maupun dalam kelompok yang lebih terlembaga tersebut, masyarakat lebih memungkinkan dan siap untuk dimobilisasi berdasarkan

¹² *Ibid* hal 5

¹³ *Op Cit*

¹⁴ *Ibid*, hal 6

ikatan dalam kelompok tersebut.¹⁵ Dengan demikian, tidak mengherankan jika agama terus memainkan peran penting dalam politik di Indonesia.¹⁶

Tuanku merupakan gelar bagi individu yang memiliki kelebihan tertentu dalam Islam. Tarekhat sebagai salah satu bagian dari Islam memosisikan *tuanku* sebagai orang yang memiliki kesempurnaan, serta orang yang dipatuhi. Kepatuhan ini disebabkan oleh faktor pengetahuan agama *Tuanku* yang luas. Keberadaan *Tuanku* sebagai pemimpin jemaah memiliki peranan penting, sehingga tak jarang jemaah sangat mematuhi aturan maupun perkataan *Tuanku*.¹⁷

Peran dan fungsi *Tuanku* sering dikaitkan dengan tugas serta nilai spiritual yang mengiringi kehidupan spiritualnya. Zamakhsyari Dhafir¹⁸ menguraikan beberapa fungsi kiai, diantaranya sebagai ‘*alim, wara*’, dan *zuhud*.¹⁹ Fungsi *Tuanku* kemudian menunjukkan peran spesifik yang tercermin dari kehidupan *Tuanku*. Dimana peran *Tuanku* memiliki nilai-nilai spiritual berupa tiga peran pokok yang mencakup beberapa hal.²⁰

¹⁵ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. “Voting Behavior in Indonesia since Democratization”, dalam *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ “Peran Zubir *Tuanku* Kuniang Dalam Mendukung Dedi Edwar Pada Pemilihan Umum DPRD Sumatera Barat Tahun 2009,” Skripsi Program Sarjana (S.1) di Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang, ditulis oleh Nanda Eko Putra Halim pada tahun 2013. Skripsi ini dibimbing oleh: Drs. Syaiful, M.Si (Pembimbing I) dan Sadri, S.IP,M.Soc.Sc (Pembimbing II).

¹⁸ Zamakhsyati Dhafir, *Tradisi Pondok Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta, LP3ES, 1982, hlm, 56

¹⁹ ‘*Alim*, sosok yang dianggap mengetahui agama Islam yang dibuktikan dengan tugas-tugas sebagai guru, mubaligh, khatib, dan sebagainya, *wira'i* sosok yang berakhlak mulia; sopan, *Tawadhu*, *Ta'addud*, Sabar, *Tawakal*, ikhlas dan sebagainya. *Zuhud* adalah sosok yang tidak lupa terhadap urusan dunia, tetapi selalu mementingkan kehidupan akhirat, sikap membiasakan dan mementingkan akhirat.

²⁰ *Ibid*

Pertama, Guru ngaji. Tugas kiai sebagai guru *ngaji* diuraikan dalam bentuk lebih khusus dalam jabatan-jabatan sebagai berikut: Mubaligh, Khatib shalat hari raya (ied). Kedua, Tuanku berperan sebagai tabib/pemimpin, tugas Tuanku sebagai tabib ini diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: mengobati pasien dengan doa (ruqyah), mengobati menggunakan alat non medis. Peran yang ketiga adalah sebagai Rais/Imam, Tuanku misalnya; imam shalat rawatib dan shalat sunnah lainnya, Imam tahlilan, dan Imam prosesi perawatan kematian dan penyampai maksud/hajatan. Terakhir, Tuanku juga berperan sebagai pegawai pemerintah/jabatan formal.²¹

Perubahan sosial yang terjadi pada dinamika kehidupan sosial islam, tidak hanya menggeser sendi-sendi kehidupan islam, namun juga bergesernya peran dan fungsi Tuanku dalam sistem sosial tarekat. Abdul Munir Mulkan dalam penelitian mengungkap adanya perubahan peran Tuanku.²²perubahan ini mengungkapkan bahwa Tuanku tidak murni mengurus agama saja, namun juga mengambil peran di ranah politik. Salah satu peran baru yang dimainkan oleh Tuanku adalah “pengumpul suara” atau *vote getter* untuk memenangkan calon atau partai tertentu.²³

Fenomena *Tuanku* yang berperan sebagai pendulang suara yang biasa disebut *voter getter* ini, dapat mempengaruhi pilihan politik pemilih. Tidak hanya itu saja, pada beberapa kasus *tuanku* juga menjanjikan ribuan suara kepada partai

²¹ *Ibid*, hal 7

²² Abdul Munir Mulkan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri (Kebudayaan dalam Dakwah Islam)*, Yogyakarta; Press, 1994, hal 16

²³ *Ibid*

politik atau kandidat tertentu.²⁴ Fenomena Tuanku yang terlihat aktif dalam politik praktis ini, juga dilakukan oleh beberapa Tuanku di Tarekhat Syathariyah seperti Tuanku H. Suherli Zubir dan Tuanku H. Sutan Maetek. Hal ini terlihat dari keterlibatan Tuanku dalam pemilukada Kabupaten Padang Pariaman, seperti dukungan Tuanku Suhaili Zubir terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, yaitu pasangan Suharti bur-Rahmang.²⁵

Pada kasus dukungan ulama syatariyah kepada Suharti Bur dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, diantaranya terlihat baliho di lingkungan pondok pesantren syatariyah dan juga sisi keakraban Suharti Bur dengan elit Tarekhat Syathariyah ini.²⁶ Praktek dukungan politik yang seperti demikian terjadi pada saat pemilu 2004 dan juga Pemilu Legislatif 2009, dan juga pemilukada 2015. Fenomena ini juga dibenarkan oleh pernyataan Suhaili Tuanku Mudo yang mengatakan bahwa akan menghimbau para jamaah untuk mendukung Suharti Bur-Rahmang dalam pemilukada Padang Pariaman 2020, berikut kutipan wawancaranya:

“Buya (Suherli Zubir Tuanku Kuniang) mendukung Suhatri Bur-Rahmang pada pemilukada Padang Pariaman 2020 saat Suhatri Bur mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Suhatri Bur mempunyai kedekatan dengan kami, Di samping pernah menjadi santri disini beliau juga seorang alumni yang berpengaruh di lingkaran Tarekhat

²⁴ Martin Van Bruinessen, *Tarekat dan Politik: Amalan Untuk Dunia atau Akhirat*, Pondok Pesantren Vol. IX No. 1 (1992), hal, 14

²⁵ Hasil temuan peneliti yang menjabarkan ajakan bahwa Tuanku Suherli Zubir dan Tuanku Sutan Maetek menghimbau jemaat dan masyarakat untuk mendukung pasangan Suhartibur-Rahmang.

²⁶ Temuan Survey awal pada 27 November 2020.

Syathariyah dan dekat dengan ulama, Alhamdulillah semoga beliau menjadi pemimpin amanah di Padang Pariaman ..”²⁷

Selain pernyataan dari Tuanku Tarekhat Syathariyah, asumsi peneliti juga diperkuat oleh rekapitulasi hasil perolehan suara Suharti Bur- Rahmang pada pemilukada 2020 lalu. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Perolehan Suara Capub dan Cawapub
Pada Pemilukada Padang Pariaman 2020

Nama Bupati	Jumlah Suara	Daerah Pemilihan
Suhatri bur SE, MM & Drs. Rahmang, MM	64,493	Padang Pariaman
Tri Suryadi, SE, M.Si & H. Taslim, SH, MM	57.550	
H. Refrizal & Happy Neldi SE, MM	36.585	

Sumber : KPU Padang Pariaman

Dari tabel diatas terlihat suara Suhatri bur dan Rahmang unggul di daripada calon calon lain, daerah Padang Pariaman menjadi pusat atau kantong-kantong jamaah Tarekhat Syatariyah. Menjadikan pasangan ini menang dalam kontestasi pemilukada Padang Pariaman tahun 2020.

Tabel 1.2 Rincian Rekapitulasi Perolehan Suara Per Kecamatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020

No	Kecamatan	(01)	(02)	(03)	Jumlah
		Suhatri Bur-Rahmang	Tri Suryadi-Taslim	Refrizal-Happy Neldi	
1	Batang Anai	6.357	5.095	4.277	15.679
2	Lubuk Alung	6.627	4.065	4.934.	15.626

²⁷ Wawancara dengan H.Tuanku Sutan Maetek Ketek di Pondok Pesantren Darul Ikhlas DI Sarang Gagak, Nagari Pakandangan, Pada Jumat 27 November, Pukul 14:22 WIB

3	Sintoga	3.221	2.214	1.765	7.200
4	Ulakan Tapakis	3.973	2.623	1.164	7.760
5	Nan Sabaris	4.764	3.354	2.683	10.801
6	Enam Lingkung	7.146	1.603	712	9.470
7	2 x 11 Kayu Tanam	4.919	3.140	1.722	9.781
8	VII Koto	4.494	5.145	3.178	12.817
9	Patamuan	2.415	2.556	1.729	6.700
10	Padang Sago	1.248	1.360	766	3.374
11	V Koto Timur	1.668	2.675	1.744	6.087
12	V Koto Kampung Dalam	1.830	3.101	5.611	10.542
13	Sungai Limau	3.193	6.443	1.868	11.504
14	Sungai Geringging	3.457	6.227	1.561	11.245
15	Batang Gasan	1.763	1.718	753	4.234
16	IV Koto Aur Malintang	2.981	2.913	1.618	7.512
17	2 x Enam Lingkung	4.069	2.293	703	7.065
	Jumlah	64.125	56.525	36.747	157.39
	Presentase (%)	40,74	35,91	23,35	

Sumber data: KPU Padang Pariaman

1.2 Rumusan Masalah

Tarekhat Syattariyah merupakan Tarekhat paling awal masuk ke daerah minangkabau. Hal ini yang paling menonjol adalah bahwa Tarekhat Syattariyah di Minangkabau berkembang melalui lembaga pendidikan tradisional yang disebut dengan surau. Hal ini merupakan sesuatu yang khas terjadi di minangkabau, karena surau menjadi basis pengembangan tarekat, bukan hanya Tarekhat Syattariyah, tapi juga Tarekhat Naqsyabandiyah, Sammaniyah dan Rifaiyah.²⁸

Surau Tarekhat Syattariyah pertama di minangkabau adalah di Ulakan, yaitu Surau Syekh Burhanudin. Pengaruh Ulakan bagi perkembangan Islam di Minangkabau cukup besar. Dalam sejarah para ulama Tarekhat Syattariyah sering dikatakan bahwa Ulakan ini adalah pusat penyebaran Islam. Silsilah atau mata rantai surau-sarau di Minangkabau dimulai dari Ulakan.²⁹ Sampai sekarang pun, keberadaan pengikut Tarekhat Syathariyah masih dapat disaksikan dalam berbagai aspek kehidupan di Padang Pariaman. Dalam Praktek keagamaan misalnya, mereka masih melaksanakan tradisi penentuan masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri melalui metode “*maniliak bulan*”³⁰(*ruqyah*) (Malalak, 2009), tradisi menggunakan bahasa arab dan memakai sorban serta tongkat dalam khutbah hari raya maupun khutbah Jumat (*Antara Sumbar*, 21 September 2009). Mereka juga

²⁸ Oman Fathurahman. *Tarekat Syattariyah di Minangkabau*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 22

²⁹ Taufik Abdullah. *Islam Dan Masyarakat* Jakarta: LP3ES, 1987, hal 127

³⁰ Melihat *hilal* sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dengan mata telanjang, tanpa menggunakan alat bantu seperti teropong yang modern.

masih menjalankan tradisi *basapa* (bersyafar)³¹ ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan.³²

Dalam catatan penulis, beberapa rekam jejak tuanku dan jamaah Syathariyah dalam memberikan dukungan politik kepada kandidat pada Pilkada Padang Pariaman adalah: Pertama, Pada tahun 2005, ulama senior Tarekhat Syathariyah yang berpengaruh, yaitu almarhum Buya H. Zubir Tuanku Kuniang, dan Tuanku Muhammad Yunus, beserta jaringan tuanku dan jamaah Syathariyah telah memberikan dukungan politik kepada Muslim Kasim - Ali Mukhni. Kedua, Pada tahun 2010, Almarhum Buya H. Zubir Tuanku Kuniang dan jaringan tuanku serta jamaah Syathariyah juga telah memberikan dukungan politik kepada Yobana Samial dan Dasril, yang dikonkritkan melalui selebaran “pamflet”. Ketiga, Pada tahun 2015, Almarhum Buya Zubir Tuanku Kuniang dan jaringan tuanku serta jamaah Syathariyah telah memberikan dukungan politik kepada Ali Mukhni - Suhatri Bur (AM-SB). Dari fakta ini terlihat bahwa tuanku dan jamaah Syathariyah masih berada pada posisi “penggembira”, sebatas pemberi legitimasi kepada kandidat yang berasal dari kalangan eksternal mereka.³³

Syathariyah yang dianggap memiliki jaringan sosial murid dan jumlah massa yang banyak, yang berpotensi menjelma menjadi mesin politik untuk

³¹ Tradisi menziarahi makam Syekh Burhanuddin setiap bulan *Syafar*, Selain untuk beribadah, *basapa* juga merupakan ajang berkumpulnya anggota Tarekat Syathariyah dan seluruh Sumatera Barat dan wilayah lainnya di Indonesia untuk membicarakan segala sesuatu tentang Tarekat Syathariyah.

³² Oman Fathurahman. *Tarekat Syattariyah di Minangkabau*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2008,hal. 29

³³ <http://sitinjausumbar.com/berita/detail/membaca-peluang-politik-tuanku-Syathariyah-di-pilkada>

memenangkan kandidat dalam Pilkada. Intinya, tuanku dan jamaah Syathariyah selama ini cenderung hanyut terbuai menari di irama gendang orang lain. Kenapa tidak mencoba untuk memainkan irama gendang sendiri.³⁴

Dalam Pemilukada Bupati Padang Pariaman tahun 2020 yang kelompok ulama aliran syathariyah telah sepakat untuk mendukung pasangan Suhatri Bur dan Rahmang untuk maju menjadi Bupati Padang Pariaman periode selanjutnya. Tarekhat Sathariyyah sangat berperan besar dalam kekuatan politik lokal di Padang Pariaman, seperti bisa dikatakan penduduk Padang Pariaman mayoritas menganut Tarekhat ini, penganut Tarekhat Syathariyah di Padang Pariaman dapat dimaklumi, karena nagari 5 (negeri) Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman merupakan bekas “pusat pengembangan Islam dan Tarekhat Syathariyah pertama di Minangkabau (Sumatera Barat), yang dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan, murid dari Syekh Abdurrauf al-Sinkili”.³⁵

Dengan demikian, Tarekhat Syathariyah telah menjadi Tarekhat yang paling awal berkembang, dan sangat mengakar pada sebagian masyarakat di Padang Pariaman. Tarekhat Syathariyah juga pernah menjadi satu-satunya representasi Islam tradisional di Sumatera Barat sebelum kemunculan Tarekhat Naqsyabandiyah sekitar tahun 1850 M.³⁶ Dan calon Bupati Suharti Bur juga sangat dekat dengan Tarekhat ini dan salah satu alumni dan santri di pesantren darul ikhlas Tarekhat Sathariyyah. Penulis menyimpulkan adanya dukungan yang

³⁴ Sadri Chaniago, *Tuanku dan Politik: Kiprah Ulama Tarekhat Syathariyah dalam Dinamika Politik Lokal Minangkabau*, Padang, Erka,

³⁵ Fathurrahman, 2003:70-71).

³⁶ *Ibid*

besar pada pasangan ini dalam pemilukada Bupati Padang Pariaman tahun 2020 dengan berbagai kunjungan politik di ulakan Padang Pariaman dan silaturahmi antara *Tuanku* dan murid serta adanya gerakan pengajian (*tausiyah*) untuk menghimbau jamaah untuk mendukung Suhari Bur-Rahmang pada kontestasi pemilukada Padang Pariaman Sumatera Barat tahun 2020.

Suharti Bur adalah Wakil Bupati terpilih Padang Pariaman tahun 2015 yang berpasangan dengan Rahmang pada pemilukada 2020 Suharti Bur mempunyai kedekatan dengan *Tuanku Tuanku* di ulakan Padang Pariaman karena beliau sebagai alumni dan mempunyai hubungan kekerabatan pertalian antara guru dengan murid dan berupaya menggunakan jaringan Tarekhat ini untuk kepentingan politik baik dari kampanye kampanye yang dilakukan pada bulan bulan *syafar* dan *syaban* menjaring jamaah untuk memberikan dukungan dan melakukan kampanye di pesantren pesantren yang berafiliasi dengan Tarekhat Syathariyah di Padang Pariaman, juga memberikan beberapa alat peraga kampanye seperti pamflet baliho, stiker di tempat makam Syekh Burhanuddin dan pesantren pesantren di Padang Pariaman. Disamping memiliki dengan beberapa *Tuanku Tuanku* di ulakan Suharti Bur dikenal sebagai penganut aliran Sattariyah yang taat seperti melihat bulan (*maniliak*) pada memasuki bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri, dan melakukan ritual (*basapa*) atau ziarah ke makam syekh Burhanuddin.³⁷

Tuanku Tarekhat Syathariyah yang memilih kiprah politik model akar pohon biasanya juga akan memainkan peran penting sebagai “aktor di balik layar” (*the man behind the gun*) yang sangat menentukan dalam proses dan percaturan

³⁷ Temuan survey awal pada 22 Oktober 2020, di Makam Syekh Burhanuddin Ulakan.

politik lokal. Mereka ini lazimnya adalah para Tuanku *senior*, yang memiliki pengaruh kuat dalam kalangan Tarekhat Syathariyah. Menurut Syofyan Tuanku Bandaro dipahami bahwa Tuanku senior Tarekhat Syathariyah yang melakukan kiprah politik model akar pohon memosisikan diri sebagai pemberi saran dan nasehat kepada seluruh jamaah. Baik berupa anggota partai politik maupun tidak.

Keberadaan kiai yang dalam konteks lokal Padang Pariaman disebut Tuanku, memiliki arti dan fungsi penting bagi jamaah tarekat. Pada dasarnya tarekat, merupakan bentuk kehidupan *sufi* dan *tasawuf*³⁸, yang merupakan kegiatan keagamaan murni yang tidak ada hubungannya dengan politik. Demikian juga halnya dengan Tarekhat Syathariyah di Kabupaten Padang Pariaman yang semestinya tidak bersinggungan dengan politik.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang kontras dengan fungsi *Tuanku* sesungguhnya. Fenomena Tuanku Syathariyah yang peneliti temui di lapangan justru memperlihatkan hal yang bertolak belakang dengan nilai nilai tarekat, Tuanku pada kenyataannya bergerak ke ranah politik. Hal ini seperti yang peneliti paparkan pada latar belakang mengenai keterlibatan Tuanku H.Suhaili Zubir Tuanku Mudo dan tuanku H. Sutan Maetek Ketek Tuanku H. Ali Amran dan beberapa Tuanku di Tarekhat Syathariyah lainnya dalam mendukung Pasangan Bupati Padang Pariaman Suhatri bur- Rahmang pada pemilu pada 2020 yang merupakan salah satu bentuk pergeseran nilai dan peran kelompok Tarekhat Syathariyah tersebut.

³⁸ Mahmud Sujuthi, *Perubahan Orientasi Politik Kaum Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Jombang*, Galang Press, Yogyakarta, 2001, hal 65

Melihat fenomena yang peneliti paparkan pada latar belakang, terdapat ketidaksesuaian atau benturan antara fungsi tuanku yang seharusnya dengan yang peneliti temukan di lapangan. Tuanku yang memiliki otoritas atas kelompoknya berperan dalam bidang agama, misalnya saja memberikan ceramah di pengajian, mengajar santri-santri di pondok pesantren dan fungsi spiritual lainnya. Dukungan politik Tuanku Tuanku di Tarekhat Syathariyah di Padang Pariaman terhadap Suhatri bur-Rahmang merupakan wujud nyata dari politik identitas dan agama ditengah besarnya dominasi penganut syathariyah di Padang Pariaman sebagai kekuatan politik lokal.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apa Peran Tuanku Tuanku Tarekhat Syathariyah di Padang Pariaman dalam mendukung Suhatri bur- Rahmang pada Pemilu Kabupada Padang Pariaman tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Mendeskripsikan dan Menjelaskan,

1. Untuk mendeskripsikan peran Tuanku Tarekhat Syathariyah dalam kemenangan Suhatri Bur- Rahmang pada Pemilu Kabupada Kabupaten Padang Pariaman 2020.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Tuanku Tarekhat Syathariyah dalam mendukung Suharti Bur-Rahmang pada Pemilu Kabupada Kabupaten Padang Pariaman 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk peneliti sendiri maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan tersebut antara lain adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini untuk kepentingan studi dan kajian ilmu, serta menjadi referensi tambahan untuk penelitian lainnya. Serta menjadi tambahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah dengan penggunaan organisasi tarekat agama dalam Pemilukada dan Peran tokoh agama dalam mendukung kandidat dalam pemilu.
2. Secara Praktis dari segi praktis, penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi wawasan baru dan pendidikan politik terhadap organisasi agama dan Tarekhat islam di Nusantara.

